

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, SHARE SEKTOR INDUSTRI DAN PERTANIAN SERTA TINGKAT JUMLAH ORANG YANG BEKERJA TERHADAP KETIMPANGAN WILAYAH ANTAR KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2002-2010

Benedictus Riandoko Adi Kurniawan, FX. Sugiyanto¹

Jurusan IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

Inequality is a development problem that cannot be eliminated, especially in developing countries. Regional inequality in Central Java Province depend on nature and demographical capability from each region in Central Java Province. This study aimed to calculate the level of inequality in the area of Central Java Province, proving Kuznets hypothesis, and to analyze the influence of independent variables growth, share from agriculture and industry sector and rate of employment on regional disparities in the Central Java Province in the period 2002 to 2010. This study uses secondary data which was obtained from Badan Pusat Statistik (BPS) Central Java Province. This research method are analysis descriptive statistics and regression analysis with panel data which use fixed effect model. The results from this studies conclude that regional inequality in Central Java Province still high enough and Kuznets hypothesis proved. Based on the results of the regression, share agriculture and industry sector variables have positive and significant of regional disparities in Central Java Province. Growth variables has positive but not significant impact on regional disparities, and rate of employment has negative but not significant impact on regional disparities in Central Java Province.

Keywords: Regional Disparities, Growth, share of agriculture and industrial sector, and rate of employment.

PENDAHULUAN

. Pembangunan ekonomi daerah sejatinya merupakan suatu proses yang memerlukan sinergi dan koordinasi antara pemerintah daerah serta masyarakatnya dalam mengelola sumber daya yang ada. Koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakatnya dapat berupa pembentukan pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan memacu pertumbuhan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Kuncoro, 2004).

Indonesia merupakan salah satu negara sedang berkembang yang memulai pembangunan secara terarah dan intensif pada jaman orde baru melalui program Pelita I. Ketimpangan antar daerah muncul seiring dengan pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia. Ketimpangan ini terjadi karena pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tidak terjadi secara serempak dan merata pada semua daerah di Indonesia. Ketidakmerataan tampak secara spasial di Indonesia antara Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa (Kuncoro, 2002).

Sejak tahun 2002 mulai diberlakukan kebijakan Otonomi Daerah yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan desentralisasi fiskal dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Pelaksanaan desentralisasi fiskal diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang berdasarkan distribusi pendapatan yang merata dan optimalisasi *local government expenditure*. Namun realisasinya tergantung tingkat kesiapan fiskal masing-masing daerah. Ketidakmampuan daerah dalam mengalokasikan dana secara efisien yang tidak didukung oleh sistem administratif yang baik dan rendahnya kekuatan redistribusi sumberdaya antardaerah (kabupaten/kota) di dalam satu provinsi, maka akan menghambat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah dan dapat meningkatkan ketimpangan regional.

Ketidakmerataan juga terjadi antar daerah di Pulau Jawa yang merupakan motor penggerak perekonomian di Indonesia. Ketimpangan pembangunan antarwilayah dapat dilihat dari perbedaan

¹ Penulis penanggung jawab

tingkat kesejahteraan (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi antarwilayah. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa yang berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang dicatatkan oleh Jawa Tengah masih lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa.

Tabel 1
Laju Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa
Tahun 2006-2010 (persen)

Provinsi	2006	2007	2008	2009	2010	rata-rata
DKI Jakarta	5.96	6.46	6.23	6.10	6.22	6.19
Jawa Barat	6.31	6.86	6.57	6.43	6.52	6.54
Jawa Tengah	5.33	5.59	5.46	4.71	5.17	5.25
DI Yogyakarta	3.70	4.31	4.22	4.11	4.19	4.11
Jawa Timur	5.79	6.04	5.90	5.75	5.88	5.87
Banten	5.57	6.04	5.87	5.65	5.73	5.77

Sumber : BPS, Statistik Indonesia, 2011

Gambaran dan pola struktur pertumbuhan masing-masing daerah yang mempresentasikan kesejahteraan penduduknya dapat diketahui memakai tipologi daerah yang didasarkan pada dua indikator yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah (Mudrajad Kuncoro,2004).Bentuk pengklasifikasian kabupaten dan kota adalah sebagai berikut :

1. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*High Growth and High Income*) yaitu kabupaten/kota dengan PDRB rata-rata per kapita di atas rata-rata PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah dan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah
2. Daerah maju tetapi tertekan (*High Income but Low Growth*) yaitu kabupaten/kota dengan rata-rata PDRB per kapita di atas PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah dan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah
3. Daerah berkembang cepat(*High Growth but Low Income*), yaitu kabupaten/kota dengan rata-rata PDRB per kapita di bawah rata-rata PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah dan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah.
4. Daerah relatif tertinggal (*Low Growth and Low Income*) ,yaitu kabupaten/kota dengan rata-rata PDRB per kapita di bawah rata-rata PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah dan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah.

TABEL 2
Kondisi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Menurut Kriteria Tipologi Daerah
Tahun 2009

<p>DAERAH BERKEMBANG CEPAT Kab Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Purworejo, Magelang, Boyolali, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Blora, Jepara, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Tegal</p> <p>Growth > 4,7% PDRB/kap < Rp 5345736,00</p>	<p>DAERAH CEPAT MAJU DAN CEPAT TUMBUH Kab Sukoharjo, Kota Magelang, Kota Surakarta</p> <p>Growth > 4,7% PDRB/kap > Rp 5345736,00</p>
<p>DAERAH RELATIF TERTINGGAL Kab Kebumen, Wonosobo, Klaten, Rembang, Pati, Demak, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Kota Salatiga</p> <p>Growth < 4,7% PDRB/kap < Rp 5345736,00</p>	<p>DAERAH MAJU TERTEKAN Kab Karanganyar,Kudus, Semarang, Kota Semarang, Kota Pekalongan</p> <p>Growth < 4,7% PDRB/kap > Rp 5345736,00</p>

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah 2009, diolah

Dari tabel 2 terdapat tiga (8,57%) kabupaten/kota yang masuk kategori daerah cepat maju dan cepat tumbuh, enam (17,14%) kabupaten/kota yang masuk dalam kategori daerah maju tertekan, sebelas (31,42%) kabupaten/kota yang masuk dalam kategori daerah relatif tertinggal dan sisanya 15 (42,85%) kabupaten/kotatermasuk dalam kategori daerah berkembang cepat. Dengan masih masih beragamnya kategori daerah di 35 kabupaten/kota menunjukkan adanya ketimpangan antar wilayah di Jawa Tengah.

Di samping pertumbuhan ekonomi, juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah. Penelitian yang dilakukan oleh Akai-Sakata (2005) dan Lessman (2006) mencari faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan wilayah, diantaranya pertumbuhan ekonomi, aglomerasi, dan jumlah orang yang bekerja. Aglomerasi merupakan suatu pengelompokan kegiatan ekonomi, umumnya bersifat homogen, di suatu tempat. Aglomerasi kegiatan ekonomi di suatu tempat akan menyebabkan daerah tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Aglomerasi kegiatan ekonomi bagi suatu industri juga akan mampu memacu pembangunan di suatu daerah melalui mekanisme penciptaan lapangan kerja dan perbaikan kesejahteraan masyarakat (Sjafrizal, 2008).

Pertumbuhan perekonomian daerah akan memberikan penguatan bagi sektor-sektor ekonomi di daerah tersebut. Dalam proses pembangunan ekonomi, suatu daerah akan mengalami pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi. Karakteristik dan kondisi suatu daerah sangat beragam dan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya menjadikan daerah itu mengalami pembangunan ekonomi yang berbeda juga (Lincoln Arsyad, 2001). Adapun struktur ekonomi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Struktur Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2001-2008 Atas Dasar Harga Konstan (persen)

Lapangan usaha	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Pertanian	22.23	22.53	21.03	21.07	20.92	20.57	20.03	19.96	19.89
Pertambangan dan galian	1	1	1	0.98	1.02	1.11	1.12	1.1	1.11
Industri Pengolahan	31.28	31.85	32.01	32.4	32.23	31.98	31.97	31.68	30.82
Listrik, gas dan air bersih	0.73	0.79	0.76	0.78	0.82	0.83	0.84	0.84	0.84
Bangunan	4.66	4.97	5.35	5.49	5.57	5.61	5.69	5.75	5.86
Perdagangan, hotel dan restoran	21.73	21.37	21.42	20.87	21.01	21.11	21.3	21.23	21.5
Pengangkutan dan komunikasi	4.69	4.77	4.82	4.79	4.89	4.95	5.06	5.16	5.27
Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	3.72	3.68	3.6	3.55	3.54	3.58	3.62	3.71	3.81
Jasa-jasa	9.95	9.03	10.02	10.06	10.01	10.25	10.36	10.57	10.89

Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka 2001-2008, diolah

Berdasarkan tabel 3, sektor industri pengolahan merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi pembentukan PDRB Jawa Tengah. Sektor pertanian menjadi sektor yang memberikan kontribusi terbesar ke-2 setelah sektor industri pengolahan. Kedua sektor ini berperan dalam perkembangan ekonomi Jawa Tengah dan penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah. Namun demikian, kedua sektor ini memiliki tempat tersendiri dalam perkembangannya. Sektor industri pengolahan umumnya berlokasi di daerah yang maju dan berkembang pesat, misalnya di perkotaan, sedangkan sektor pertanian umumnya berlokasi di daerah pedesaan di mana masih terdapat lahan bagi aktivitas pertanian. Kedua sektor ini juga berbeda dalam hal *value added*, dimana sektor pertanian umumnya memiliki nilai *value added* yang lebih kecil daripada sektor industri pengolahan. Perbedaan peran dan lokasi ini akan menyebabkan ketimpangan ekonomi antar kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Penelitian mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan telah banyak dilakukan oleh para ekonomi dunia. Penelitian ini pertama kali dilakukan oleh Simon Kuznetz (1955) melalui hipotesis U-terbaliknya. Simon Kuznets menyatakan ketimpangan ekonomi akan meningkat ketika proses pembangunan ekonomi tersebut mulai dilakukan hingga mencapai titik tertentu kemudian akan berkurang ketika proses pembangunan ekonomi tersebut telah mencapai tahap kedewasaan sehingga mulai terjadi pemerataan. Hipotesis Kuznets ini menyatakan bahwa kesenjangan akan muncul sebagai akibat dari pertumbuhan yang kemudian akan menurun seiring dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi tersebut. Kajian yang dilakukan

oleh Forbes (2000) dengan menggunakan analisis panel data juga menyatakan bahwa ketimpangan ekonomi berhubungan secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ketimpangan ekonomi antar daerah secara absolut maupun ketimpangan relatif antara potensi dan tingkat kesejahteraan dapat menimbulkan permasalahan antar daerah. Arus modal akan mengalir dan berakumulasi ke daerah-daerah yang memberikan nilai pengembalian atau tingkat pertumbuhan yang tinggi. Arus modal pada akhirnya akan terkonsentrasi ke daerah-daerah kaya sumberdaya alam dan kota-kota besar yang sarana dan prasaranya lebih lengkap. Di sisi lain, gelombang pencari kerja juga akan bergerak kearah pusat pertumbuhan yang menjanjikan keuntungan yang lebih besar. Pergerakan masyarakat pencari kerja ini akan memberikan permasalahan kepadatan penduduk bagi daerah yang menerima pencari kerja tersebut. Keadaan yang demikian akan semakin besar ketimpangan antar wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketimpangan ekonomi antar kabupaten/kota di Jawa Tengah, membuktikan hipotesis Kuznets di Jawa Tengah dan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, *share* sektor pertanian, *share* sektor industry dan jumlah tenaga kerja terhadap ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di Jawa Tengah.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Berdasarkan kajian teori dan kajian empiris tersebut maka dibuatlah kerangka penelitian dan hipotesis sebagai jawaban yang bersifat sementara untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan Wilayah

Simon Kuznets berpendapat bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, dsitribusi pendapatan cenderung memburuk, tetapi pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatan akan membaik. Observasi inilah yang kemudian dikenal dengan kurva Kuznets “U-terbalik”, karena perubahan *time-series* dalam distribusi pendapatan tampak seperti kurva U terbalik(Todaro,2003). Dengan kata lain, ketimpangan akan selalu ada dalam proses pembangunan suatu wilayah terutama pada tahap awal, namun seiring dengan perkembangan dan pendewasaan perekonomian, maka tingkat ketimpangan akan menurun Menurut Sjafizal (2008), ketimpangan antar wilayah terjadi karena perbedaan *endowment factor* berupa perbedaan kekayaan sumberdaya alam serta demografi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Perbedaan kekayaan alam yang dimiliki oleh suatu daerah dapat berpengaruh terhadap proses produksi daerah tersebut dan membedakannya satu dengan yang lain. Daerah yang memiliki ketersediaan sumberdaya alam yang tinggi dapat memproduksi barang-barang tertentu dalam jumlah yang lebih besar dan harga yang lebih murah daripada daerah yang memiliki keterbatasan dalam sumberdaya alam yang dimiliki. Kondisi yang demikian akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah yang kaya akan sumberdaya alam memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada daerah yang kekurangan sumberdaya alam. Kondisi ini dapat mendorong terjadinya ketimpangan antar wilayah satu dengan lainnya.

Hubungan antara Aglomerasi dan Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Sjafizal (2008) mengatakan terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi akan mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Konsentrasi ini tercermin dalam kegiatan aglomerasi. Pertumbuhan ekonomi daerah dengan konsentrasi ekonomi yang lebih tinggi akan lebih cepat. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Hal yang sebaliknya juga berlaku, bilamana konsentrasi ekonomi suatu daerah rendah maka akan mendorong terjadinya pengangguran dan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jaime Bonet (2006), di mana Bonet menganalisis pengaruh variabel aglomerasi produksi terhadap ketimpangan pendapat regional. Hasil penelitian Bonet menunjukkan bahwa antar aglomerasi produksi dan ketimpangan pendapatan regional terapat hubungan yang positif dan signifikan pada $\alpha=1\%$. Hal itu berarti setiap tingkat aglomerasi produksi maka akan meningkatkan ketimpangan pendapatan regional

Hubungan antara tingkat orang yang bekerja dengan Ketimpangan Wilayah

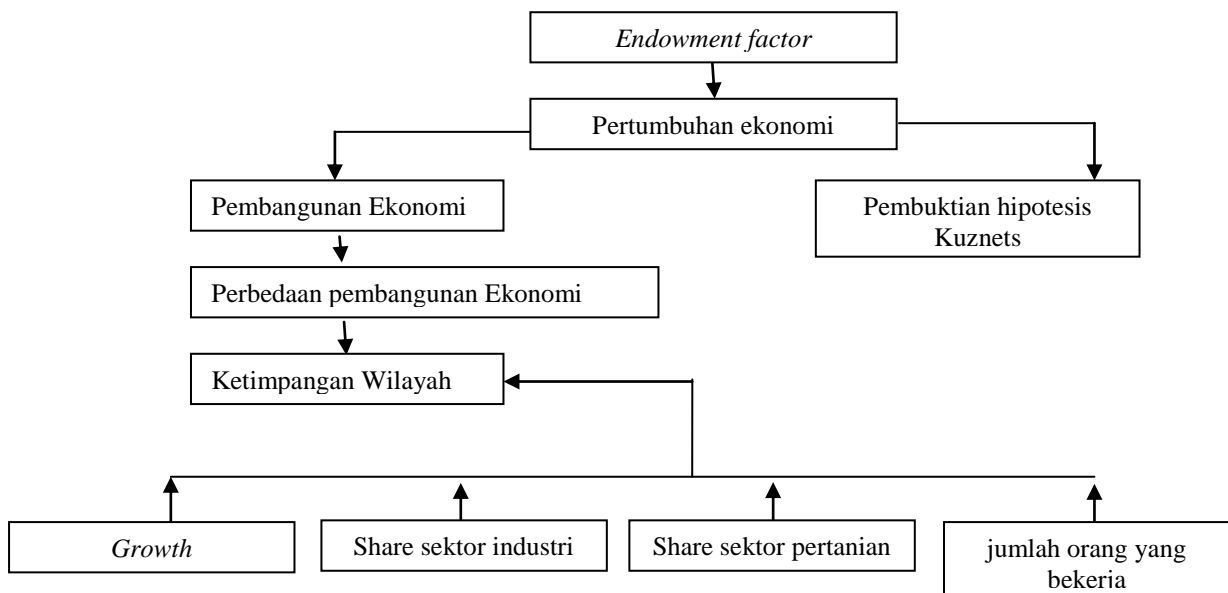
Salah satu penyebab ketimpangan wilayah adalah perbedaan kondisi geografis antar wilayah. Menurut Sjafrizal (2008), kondisi demografis suatu wilayah meliputi perbedaan tingkat

pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan etos kerja yang dimiliki oleh masyarakat daerah yang bersangkutan. Kondisi demografis berpengaruh terhadap besarnya produktivitas dari suatu daerah. Daerah yang memiliki kemampuan demografis yang baik akan mampu memiliki produktivitas yang tinggi. Tingkat orang yang bekerja berpengaruh terhadap produktivitas suatu daerah, semakin tinggi tingkat orang yang bekerja di suatu daerah akan menyebabkan produktivitas daerah tersebut lebih tinggi daripada daerah dengan tingkat jumlah orang yang bekerja yang lebih sedikit. Menurut Lessman (2006), tingkat pengangguran yang tinggi berpengaruh terhadap semakin tingginya ketimpangan wilayah.

Kerangka Pemikiran

Kegiatan ekonomi dan berbagai faktor lain akan menyebabkan pembangunan ekonomi dimana hal tersebut mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan ekonomi juga berdampak terhadap ketimpangan regional antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh masing-masing daerah berbeda oleh karena perbedaan karakteristik dan *endowment factor* yang dimiliki oleh tiap daerah. Perbedaan inilah yang pada akhirnya menyebabkan ketimpangan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat ketimpangan antar wilayah yang terjadi di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, melihat dan menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah serta mencari factor-faktor yang menyebabkan ketimpangan wilayah tersebut.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran Teoritis



Hipotesis

Hipotesis merupakan pandangan sementara dan pedoman serta arah dalam penelitian yang disusun berdasarkan pada teori yang terkait, dimana suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih (J. Supranto, 1997).

Hipotesis dalam penelitian ini adalah ;

1. Diduga terdapat ketimpangan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah
2. Diduga hipotesis Kuznets terbukti di Jawa Tengah selama periode penelitian
3. Diduga tingkat pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan ekonomi di Jawa Tengah
4. Diduga kontribusi sektor industri kabupaten/kota di Jawa Tengah berpengaruh positif terhadap ketimpangan ekonomi
5. Diduga kontribusi sektor pertanian kabupaten/kota di Jawa Tengah berpengaruh positif terhadap ketimpangan ekonomi.
6. Diduga tingkat jumlah orang yang bekerja per kabupaten/kota di Jawa Tengah berpengaruh negatif terhadap ketimpangan di Jawa Tengah.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen (terikat) dan tiga variabel independen (bebas). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2002-2010 (Iq). Sementara untuk variabel independen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi (Gw), nilai share sektor pertanian (Aglotni), nilai share sektor industri (Agloin), dan tingkat jumlah tenaga kerja (Empl). Wilayah dalam penelitian ini mencakup 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan periode penelitian adalah tahun 2002 – 2010.

Definisi Operasional

Definisi operasional untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan wilayah merupakan ketidakmerataan pendapatan yang diterima antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Dalam penelitian ini, ketimpangan wilayah diukur menggunakan Pendekatan PDRB per kapita relatif yang pada penelitian terdahulu telah digunakan oleh Jaime Bonet (2006) dan Atur J Sigalingging (2008) dalam mengukur kesenjangan wilayah. Rumus penghitungan ketimpangan wilayah ini adalah :

$$IQit = \left| \frac{PDRB PCit}{PDRBC nas it} - 1 \right| \dots\dots\dots (1)$$

Dimana :

IQit = Kesenjangan wilayah Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah, tahun 2002-2010

PDRB PC Lt = PDRB perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, tahun 2002-2010

PDRB C NAS it = PDRB per kapita Jawa tengah, tahun 2002-2010

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dinyatakan sebagai perubahan nilai PDRB atas dasar harga konstan di Provinsi Jawa Tengah (dalam satuan persen) yang dihitung dengan menggunakan rumus :

$$Growth = \frac{(Yt - Yti)}{Yti} \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan :

Growth = Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kotadi Provinsi Jawa Tengah

Yt = PDRB ADHK Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun t

Yti = PDRB ADHK Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun t-1

3. Aglomerasi Sektor Pertanian

Aglomerasi menggambarkan konsentrasi kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Aglomerasi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan penghitungan yang dipakai dalam penelitian Jaime Bonet (2006) yang mendasarkan ukuran aglomerasi pada aglomerasi produksi yang dihitung dari *share* PDRB wilayah terhadap total PDRB. Metode penghitungan aglomerasi ini dipakai untuk menghitung besaran kontribusi sektor pertanian dan industri pengolahan dalam penelitian ini. Adapun rumus tersebut adalah :

$$Agtni = \frac{PDRB sektor pertanian}{PDRB tot sektor pertanian} \dots\dots\dots (3)$$

Dimana :

Ag tni = Aglomerasi Produksi sektor pertanian kabupaten/kota di Jawa Tengah

PDRBi = Nilai kontribusi sektor pertanian Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

PDRBtot = Total nilai sektor pertanian Atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi Jawa Tengah

4. Aglomerasi Sektor Industri

Aglomerasi menggambarkan konsentrasi kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Aglomerasi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan penghitungan yang dipakai dalam penelitian Jaime Bonet (2006) yang mendasarkan ukuran aglomerasi pada aglomerasi produksi yang dihitung

dari *share* PDRB wilayah terhadap total PDRB. Metode penghitungan aglomerasi ini dipakai untuk menghitung besaran kontribusi sektor pertanian dan industri pengolahan dalam penelitian ini. Adapun rumus tersebut adalah :

$$Ag\ in = \frac{PDRB\ sektor\ industri}{PDRB\ tot\ sektor\ industri} \dots\dots\dots (4)$$

Dimana :

Ag in = Aglomerasi Produksi sektor industry kabupaten/kota di Jawa Tengah

PDRBi = Nilai kontribusi sektor industri Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

PDRBtot = Total nilai sektor industri Atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi Jawa Tengah

5. Tingkat Orang Bekerja

Tingkat orang bekerja dalam penelitian ini merupakan seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang bekerja menghasilkan barang dan jasa pada suatu tingkat upah tertentu. Nilai tingkat orang bekerja merupakan persentase dari jumlah orang yang bekerja dibagi dengan jumlah penduduk dalam periode waktu tertentu. Nilai tingkat orang bekerja ini dirumuskan sebagai berikut :

$$Empl = \frac{\Sigma\ orang\ yang\ bekerja}{\Sigma\ penduduk} \times 100\% \dots\dots\dots (5)$$

Pengertian dari orang yang sedang bekerja (*employed persons*) adalah mereka yang telah bekerja dan menghasilkan barang dan jasa pada suatu tingkat upah tertentu, sedangkan pengertian angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama dan kedua yakni untuk melihat profil ketimpangan antar wilayah di Jawa Tengah dan hubungan antara ketimpangan dengan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Pertanyaan pertama, yaitu profil ketimpangan antar kabupaten di Jawa Tengah, menggunakan pendekatan PDRB per kapita relatif, dan indeks Williamson. Pertanyaan kedua, yaitu hubungan antara ketimpangan dengan pertumbuhan ekonomi, dijelaskan melalui gambar.

Analisis Regresi

Analisis regresi digunakan untuk melihat hubungan antar variabel dependen serta variabel independen dalam model penelitian. Analisis regresi dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ketiga yaitu pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi, *share* sektor industri, *share* sektor pertanian dan jumlah tenaga kerja terhadap ketimpangan antar wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Studi ini menggunakan analisis panel data sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan program Eviews 6. Analisis panel data merupakan metode analisis dengan menggabungkan data dari urutan waktu (*time series*) dengan data antar individu (*cross section*). Model estimasi regresi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *fixed effects model*. Estimasi tergantung pada asumsi yang digunakan pada konstanta, koefisien kemiringan, dan variabel error. Pemakaian model *Fixed Effect Model* karena penelitian ini menggunakan asumsi adanya perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh tiap daerah di Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, intersep bervariasi antar unit tapi tidak berbeda dalam tiap waktu (*time invariant*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.4.1 Hasil Regresi Eviews

Berdasarkan hasil regresi, terdapat 2 variabel yang signifikan dalam model yaitu variabel aglomerasi industri dan variabel aglomerasi pertanian. Kedua variabel ini memiliki nilai probabilitas yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,0047 dan 0,0248 Variabel pertumbuhan ekonomi dan tingkat jumlah orang yang bekerja tidak signifikan karena memiliki nilai probabilitas yang lebih besar dari 0,05 yaitu masing-masing sebesar 0,9928 dan 0,5470.

Tabel 4
Hasil Estimasi Regresi Utama

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.203228	0.104511	1.944.569	0.0528
GWTH?	2.06E-05	0.002293	0.009000	0.9928
AGLOIN?	0.042493	0.014909	2.850.074	0.0047
AGLOTNI?	0.057275	0.025386	2.256.164	0.0248
EMPLOY?	-0.000720	0.001194	-0.602967	0.5470
Fixed Effects				
(Cross)				
_CILACAP--C	-1,17724		_KUDUS--C	1,637889
_BANYUMAS--C	-0,02852		_JEPARA--C	-0,268760
_PRBALINGGA--C	0,05482		_DEMAK--C	-0,032850
_BANJARNGR--C	-0,06557		_SEMARANG--C	-0,192120
_KEBUMEN--C	0,09309		_TEMAGUNG--C	-0,064460
_PURWORJO--C	-0,22676		_KENDAL--C	-0,317040
_WONOSOBO--C	0,12261		_BATANG--C	-0,077170
_MAGELANG--C	-0,16945		_PKALONGAN--C	-0,165010
_BOYOLALI--C	-0,43635		_PEMALANG--C	0,070011
_KLATEN--C	-0,36904		_TEGAL--C	0,115926
_SUKOHARJO--C	-0,19430		_BREBES--C	-0,348630
_WONOGIRI--C	-0,07344		_KMAGELANG--C	0,632195
_KARANGNYR--C	-0,21147		_KSURAKARTA--C	0,712254
_SRAGEN--C	-0,10163		_KSALATIGA--C	-0,088340
_GROBOGAN--C	0,09355		_KSEMARANG--C	1,229312
_BLORA--C	0,11073		_KPKALONGAN--C	0,353790
_REMBANG--C	-0,18507		_KTEGAL--C	-0,131090
_PATI--C	-0,30190			

Profil Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Ketimpangan antar wilayah ini terjadi karena perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing daerah yang menyebabkan satu atau beberapa daerah lebih maju dibandingkan daerah lainnya. Ketimpangan antar wilayah juga dapat terjadi karena perbedaan kemampuan finansial antar wilayah. Perbedaan kemampuan finansial ini menyebabkan pembangunan wilayah tidak bisa berlangsung secara serentak dan seragam sehingga terjadi perbedaan pembangunan wilayah. Berikut disajikan data mengenai perkembangan ketimpangan wilayah di Kabupaten/Kota di Jawa tengah menggunakan indeks Williamson :

Tabel 5
Keadaan Ketimpangan Wilayah di Jawa Tengah dengan Indeks Williamson
Tahun 2002-2010

tahun	IW	perubahan (%)
2002	0.664313	
2003	0.682872	2.793727289
2004	0.695868	1.903024498
2005	0.696084	0.031017166
2006	0.676545	-2.806978888
2007	0.67366	-0.426424997
2008	0.670363	-0.489303135
2009	0.664773	-0.833931637
2010	0.664002	-0.116041005

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2002-2010, diolah

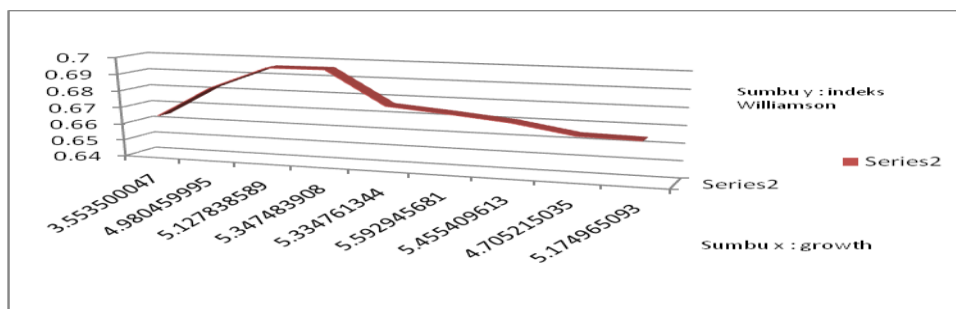
Pada tabel 5, dapat dilihat selama tahun 2002-2005, indeks ketimpangan Williamson meningkat. Kenaikan nilai indeks Williamson ini menggambarkan peningkatan ketimpangan antar wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Ketimpangan wilayah Propinsi Jawa Tengah yang diukur dengan Indeks Williamson mengalami penurunan mulai tahun 2006 hingga 2010. Ketimpangan wilayah yang terjadi di Jawa Tengah ini disebabkan karena perbedaan karakteristik wilayah-wilayah tersebut. Disamping itu terdapat pula faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat ketimpangan di suatu wilayah. Myrdal (Jhingan, 1993) dalam teorinya mengenai dampak balik (*backwash effect*) dan dampak sebar (*spread effect*) mengemukakan bahwa dampak balik cenderung membesar dan dampak sebar yang semakin mengecil membuat ketimpangan wilayah di negara-negara terbelakang.

Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan di Jawa Tengah

Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama periode penelitian selalu mencatatkan nilai pertumbuhan ekonomi yang positif. Di sisi lain, ketimpangan ekonomi Jawa Tengah yang diukur dengan Indeks Williamson juga mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2005. Ketimpangan ekonomi Jawa Tengah mulai menurun pada tahun 2006 hingga tahun 2010.

Gambar 2

Kurva Hubungan Antara Indeks Ketimpangan Williamson dengan Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002-2010



Sumber : BPS, Berbagai Terbitan Tahun, diolah

Gambar 2 merupakan hubungan antara ketimpangan (sumbu vertikal) dengan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Sumbu horizontal pada gambar merupakan nilai pertumbuhan ekonomi yang dialami Jawa Tengah selama periode tahun 2002-2010. Sumbu vertikal pada gambar merupakan nilai indeks ketimpangan Williamson selama periode tahun 2002-2010. Gambar 2 menunjukkan hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi yang berbentuk U terbalik. Bentuk hubungan ini sesuai dengan pengujian yang dilakukan oleh Kuznet.

Nilai indeks ketimpangan Willamson pada awalnya mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh Jawa Tengah. Kenaikan indeks ketimpangan pada awal masa periode penelitian disebabkan oleh adanya pemberlakuan kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal. Kebijakan ini memberikan kewenangan yang lebih bagi pemerintah daerah untuk mengelola kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Namun demikian, kemampuan setiap daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam otonomi daerah ini berbeda-beda. Perbedaan kemampuan ini dapat disebabkan oleh perbedaan infrastruktur, suprastruktur dan kemampuan masing-masing aparat daerah dalam menghadapi otonomi daerah tersebut. Daerah perkotaan mampu bertumbuh dan berkembang lebih cepat daripada daerah pedesaan pada masa awal periode penelitian oleh karena fasilitas infrastruktur dan suprastruktur yang lebih baik serta kesiapan aparat dan system kelembagaan yang lebih terkoordinasi. Dengan demikian, pada masa awal penelitian ketimpangan meningkat.

Penurunan nilai indeks ketimpangan Williamson mulai terjadi pada tahun 2006. Penurunan indeks ketimpangan ini disebabkan oleh karena kemampuan daerah yang tertinggal dalam hal infrastruktur, suprastruktur, aparat dan kelembagaan telah meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Dengan kesiapan daerah yang lebih baik dalam menghadapi Otonomi Daerah, ketimpangan antar daerah di Jawa Tengah menjadi berkurang. Hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan wilayah di Jawa Tengah ini dapat diakibatkan karena manfaat dari pertumbuhan ekonomi di daerah perkotaan dan pedesaan berbeda. Investasi dan pembangunan masih berpusat di wilayah yang dirasa mampu memberikan *return* yang maksimal. Dengan demikian, investasi serta pemilihan lokasi untuk sektor-sektor yang mampu memberikan *value added* tinggi seperti sektor industri dan pengolahan masih berpusat di daerah perkotaan dan daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah. Kondisi yang demikian diakibatkan oleh pemilihan lokasi para produsen yang lebih mendekati diri ke pasar atau ke sumber bahan baku. Jika keadaan ini dibiarkan tanpa adanya kebijakan pemerintah untuk mengatur, maka ketimpangan ekonomi antar wilayah di Jawa Tengah akan semakin membesar.

Kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan percepatan pembangunan di daerah. Percepatan pembangunan ini dapat melalui insentif penyediaan akses dan infrastruktur di daerah yang masih tertinggal / belum maju. Di sisi lain, perlu ada pembatasan agar pembangunan tidak selalu berfokus di perkotaan. Kebijakan yang demikian penting untuk pemerataan dan meminimalisasi arus urbanisasi tenaga kerja dari desa ke kota sehingga mampu mengurangi beban akibat kepadatan penduduk yang tinggi di perkotaan. Contoh konkretnya adalah dengan menjadikan daerah pedesaan sebagai penyangga kebutuhan (daerah *buffer*) bagi daerah perkotaan. Daerah pedesaan dapat dioptimalkan sebagai pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat kota oleh karena ketersediaan lahan yang masih cukup untuk sektor pertanian daripada lahan di perkotaan. Insentif bagi pembangunan di pedesaan dapat berupa penyediaan infrastruktur fisik dan non-fisik, pemberian pajak dengan tingkat yang rendah bagi usaha di pedesaan, pemberian kemudahan bagi pendirian usaha di daerah pedesaan dan penguatan kapasitas daya beli masyarakat pedesaan.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi Sektor Industri, Aglomerasi Sektor Pertanian dan Tingkat Jumlah Orang yang Bekerja Terhadap Ketimpangan Wilayah di Propinsi Jawa Tengah tahun 2002-2010

Adapun hasil regresi persamaan yang diolah menggunakan Eviews 6.0 secara matematis sebagai berikut :

$$\text{INEQUALITY} = 0,203 + 0,0000206 \text{ GROWTH} + 0,042 \text{ AGLOIN} + 0,057 \text{ AGLOTNI} - 0,0007 \text{ EMPLOY} + \text{D}$$

Intepretasi hasil regresi pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, aglomerasi sektor industri, aglomerasi sektor pertanian, dan tingkat jumlah orang yang bekerja terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2002-2010 adalah sebagai berikut :

a. Pertumbuhan Ekonomi

Hasil regresi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas yang lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,99. Kenaikan sebesar 1 persen pertumbuhan ekonmi akan meningkatkan

ketimpangan sebesar 0,0000206. Hasil ini sesuai dengan hipotesis awal yang menduga terdapat hubungan yang positif antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan wilayah.

Hubungan positif yang terjadi antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan wilayah bisa disebabkan karena pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah belum terjadi secara merata. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi umumnya dirasakan oleh daerah yang masuk dalam kategori kota ataupun memiliki kekayaan alam yang lebih. Perbedaan kepemilikan asset oleh suatu daerah berupa *endowment factor* yang dimiliki akan mampu menciptakan ketimpangan antar wilayah. Hasil ini juga sesuai dengan hipotesis Neo-Klasik (Sjafrizal, 2008) yang mengatakan bahwa pada permulaan proses pembangunan suatu wilayah, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat.

b. Aglomerasi Sektor Industri

Dari hasil regresi diperoleh hasil bahwa aglomerasi sektor industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,047. Kenaikan 1 persen aglomerasi di sektor industri akan meningkatkan ketimpangan sebesar 0,042. Hasil regresi sesuai dengan hipotesis penelitian awal yang menduga terdapat pengaruh positif antara aglomerasi sektor industri terhadap ketimpangan wilayah. Perbedaan konsentrasi kegiatan ekonomi antar wilayah yang cukup tinggi akan mendorong peningkatan ketimpangan pembangunan antar daerah dikarenakan pembangunan akan berlangsung lebih cepat pada daerah dengan tingkat konsentrasi ekonomi yang tinggi. Dengan demikian perbedaan aglomerasi ini menimbulkan ketimpangan pembangunan antar wilayah (Sjafrizal, 2008). Dengan demikian, hasil regresi yang menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan memberikan arti bahwa pengelompokan aktivitas ekonomi di suatu daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah akan meningkatkan ketimpangan ekonomi. Hal ini karena peningkatan aglomerasi ekonomi, yang dihitung dengan porsi nilai sektor industri daerah Kabupaten/Kota terhadap total nilai sektor industri Propinsi Jawa Tengah, akan menyebabkan penurunan nilai bagi wilayah yang lain. Perbedaan kondisi ini, di mana satu daerah mengalami peningkatan dan daerah lain mengalami penurunan, akan menyebabkan ketimpangan ekonomi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jaime Bonet (2006), yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara aglomerasi dengan ketimpangan wilayah. Dengan demikian, hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan sehingga hipotesis penelitian dapat diterima.

c. Aglomerasi Sektor Pertanian

Dari hasil regresi diperoleh hasil bahwa aglomerasi sektor industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,0248. Kenaikan 1 persen aglomerasi di sektor industri akan meningkatkan ketimpangan sebesar 0,057. Hasil regresi sesuai dengan hipotesis penelitian awal yang menduga terdapat pengaruh positif antara aglomerasi sektor pertanian terhadap ketimpangan wilayah.

Robison Tarigan berpendapat bahwa keuntungan berlokasi pada tempat konsentrasi atau terjadinya aglomerasi disebabkan faktor skala ekonomi (*economic of scale*) dan *economic agglomeration*. *Economic of scale* adalah keuntungan karena memproduksi sesuai dengan spesialisasi sehingga produksi menjadi lebih besar dan biaya per unit menjadi lebih efisien. Sedangkan *economic agglomeration* adalah keuntungan yang didapat karena lokasi memberikan fasilitas ketersediaan berbagai keperluan dan fasilitas yang dapat digunakan oleh pihak yang menempati lokasi tersebut. Kemampuan dan daya dukung daerah antar Kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk pengembangan sektor pertanian berbeda-beda. Sektor pertanian akan cenderung lebih dominan perannya di daerah yang tidak masuk dalam kategori perkotaan. Hal ini disebabkan ketersediaan lahan, yang merupakan faktor produksi utama dalam sektor pertanian, di perkotaan sangat terbatas.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jaime Bonet (2006), yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara aglomerasi dengan ketimpangan wilayah. Dengan demikian, hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan sehingga hipotesis penelitian dapat diterima.

d. Tingkat Jumlah Orang yang Bekerja

Dari hasil regresi diketahui bahwa tingkat jumlah orang yang bekerja memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan ekonomi di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas variable *Employment* yang lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,547. Kenaikan 1 persen tingkat jumlah orang yang bekerja akan menurunkan ketimpangan sebesar 0,00072. Sesuai dengan yang dinyatakan oleh Lincoln Arsyad (1999) bahwa pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja (*labor force*) secara tradisional dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatan kerja yang bekerja berarti semakin banyak faktor produksi tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik. Hasil penelitian ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Lessman (2006), di mana pengangguran yang tinggi berpengaruh terhadap makin tingginya ketimpangan wilayah. Hasil penelitian ini merupakan resiprokal dari penelitian Lessman di mana semakin tinggi jumlah orang yang bekerja akan menurunkan tingkat ketimpangan wilayah. Dengan demikian, hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan sehingga hipotesis penelitian dapat diterima.

e. Interpretasi konstanta dari hasil FEM

Berdasarkan hasil regresi, dapat dilihat bahwa daerah yang memiliki basis sektor industri yang dominan akan memiliki nilai konstanta yang positif dan besar. Nilai konstanta yang positif ini akan meningkatkan nilai ketimpangan yang ada. Nilai konstanta yang positif dan besar ini dimiliki oleh beberapa daerah diantaranya Kabupaten Kudus (nilai konstanta = 1.8411) dan Kota Semarang (nilai konstanta = 1.4325). Dengan demikian, sektor industri memiliki peran cukup besar dalam meningkatkan ketimpangan antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Sektor industri memberikan nilai tambah (*value added*) yang cukup besar dalam pembentukan PDRB daerah, sehingga ketidakmerataan lokasi dan kemampuan sektor industri antar daerah dapat menyebabkan ketimpangan antar wilayah meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Jawa Tengah selama periode penelitian tahun 2002-2010. Tingkat ketimpangan wilayah di Jawa Tengah yang diukur dengan indeks ketimpangan Williamson mengalami peningkatan pada periode tahun 2002-2010. Nilai indeks ketimpangan wilayah Williamson di Jawa Tengah mulai mengalami penurunan mulai tahun 2006 hingga 2010.
2. Hipotesis Kuznet mengenai kurva U-terbalik terbukti untuk Propinsi Jawa Tengah. Pada tahap pertumbuhan awal, ketimpangan ekonomi di Jawa Tengah cenderung meningkat. Namun kemudian, indeks ketimpangan ekonomi Williamson di Jawa Tengah menunjukkan penurunan nilai seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.
3. Dari hasil regresi, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dengan tingkat signifikansi t-statistik sebesar 0,9928. Hal ini berarti variabel pertumbuhan ekonomi tidak signifikan secara statistik pada $\alpha = 5\%$. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara positif karena pertumbuhan ekonomi di daerah maju akan lebih tinggi daripada daerah berkembang sehingga pada akhirnya akan mampu menciptakan dan memperbesar ketimpangan antar wilayah.
4. Variabel *share* sektor pertanian berpengaruh secara positif dengan signifikansi t-statistik sebesar 0,0047. Hal ini berarti variabel *share* sektor pertanian signifikan secara statistik pada $\alpha = 5\%$. Kenaikan satu persen *share* sektor pertanian akan meningkatkan ketimpangan sebesar 0,0042493. Variabel *share* sektor pertanian berpengaruh positif karena *share* sektor pertanian yang semakin besar mampu menjadi proksi adanya pengelompokan (aglomerasi) sektor pertanian di suatu wilayah. Kenaikan konsentrasi ini membuat wilayah dengan konsentrasi sektor pertanian yang lebih rendah menjadi terbelakang karena kalah dalam nilai output. Oleh karena itu, semakin tinggi *share* sektor pertanian menyebabkan ketimpangan wilayah.
5. Variabel *share* sektor industri pengolahan berpengaruh secara positif dengan signifikansi t-statistik sebesar 0,0248. Hal ini berarti variabel *share* sektor pertanian signifikan secara statistik pada $\alpha = 5\%$. Kenaikan satu persen *share* sektor pertanian akan meningkatkan

- ketimpangan sebesar 0,057275. Variabel *share* sektor industri pengolahan berpengaruh positif karena *share* sektor industri pengolahan yang semakin besar mampu menjadi proksi adanya pengelompokan (aglomerasi) sektor pertanian di suatu wilayah. Kenaikan konsentrasi ini membuat wilayah dengan konsentrasi sektor industri pengolahan yang lebih rendah menjadi terbelakang karena kalah dalam nilai output. Oleh karena itu, semakin tinggi *share* sektor industri pengolahan menyebabkan ketimpangan wilayah semakin besar.
6. Variabel tingkat jumlah orang yang bekerja berpengaruh secara negatif dengan signifikansi t-statistik sebesar 0,547. Hal ini berarti variabel tingkat jumlah tenaga kerja tidak signifikan secara statistik pada $\alpha = 5\%$. Variabel tingkat jumlah orang yang bekerja berpengaruh negatif karena tingkat jumlah orang yang bekerja yang semakin besar dapat menjadi faktor input bagi pembangunan suatu daerah. Nilai tingkat jumlah orang yang bekerja yang besar dapat membuat pembangunan suatu daerah menjadi lebih optimal karena tersedianya salah satu input pembangunan yaitu angkatan kerja yang bekerja. Dengan demikian, semakin besar tingkat jumlah orang yang bekerja akan mengurangi ketimpangan wilayah

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah model memiliki nilai R^2 yang tinggi tetapi jumlah variabel yang signifikan tidak dominan. Model yang demikian mengindikasikan adanya gejala multikol, sehingga konstanta maupun nilai variabel hasil regresi dalam model belum menunjukkan nilai aktual dari kondisi yang sebenarnya oleh karena adanya pengaruh hubungan antar variabel

REFERENSI

- Akai, Nobuo and Masayo Sakata. 2005. **Fiscal Decentralization, Commitment and Regional Inequality: Evidence from State-level Cross-sectional Data for the United States**. CIRJE Discussion Papers. <http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2005/2005cf315.pdf> Diakses tanggal 20 Desember 2011.
- Arsyad, Lincoln. 2004. **Ekonomi Pembangunan, Edisi Ketiga**. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Badan Pusat Statistik. **Jawa Tengah Dalam Angka Berbagai Tahun Terbitan**. Jawa Tengah.
- _____. **PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Berbagai Tahun Terbitan**. Jawa Tengah
- _____. **Statistik Indonesia Berbagai Tahun Terbitan**. Indonesia
- _____. **Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Berbagai Tahun Terbitan**. Jawa Tengah
- Bonet, Jaime. 2006. **Fiscal Decentralization and Regional Income Disparities: Evidence from The Colombian Experience**. *Ann Reg Sci* 40:661-676. <http://www.springerlink.com/content/36595348343m6660/fulltext.pdf> . Diakses tanggal 15 November 2011.
- Forbes, Kristin J. 2000. **Reassessment of The Relationship Between Inequality and Growth**. *The American Economic Review*, Vol. 90 No. 4, hal 869-887. Amerika Serikat. <http://web.mit.edu/kjforbes/www/Papers/Inequality-Growth-AER.pdf>. Diakses tanggal 20 Desember 2011
- Gujarati, Damodar. 2003. **Basic Econometrics, Fourth Edition**. McGraw-Hill Companies: New York.
- Jhingan, ML. 1993. **Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan**. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

- Kuncoro, Mudrajad. 2002. **Analisis Spasial dan regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia**. UPP AMP YKPN: Yogyakarta.
- _____. 2003. **Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan**. UPP AMP YKPN: Yogyakarta.
- Lessman, Christian. 2006. **Fiscal Decentralization and Regional Disparity: A Panel Data Approach for OECD Countries**. Ifo Working Papers. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=936874. Diakses tanggal 15 November 2011.
- Mankiw, N Gregory. 2006. **Makroekonomi, Edisi Keenam**. Erlangga : Jakarta.
- Sigalingging Atur J. 2008. **Dampak Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Wilayah**. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Fakultas Ekonomi Undip. Semarang.
- Sjafrizal. 1997. **Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat**. *PRISMA*, Maret 1997, hal 27-38, LP3ES: Yogyakarta
- _____. 2008. **Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi**. Baduose Media: Padang
- Sukirno, Sadono. 2003. **Pengantar Teori Makroekonomi**. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Sutarno, dan Mudrajad Kuncoro. 2003. **Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas 1993-2000**. <http://journal.uui.ac.id/index.php/JEP/article/view/630/560>. Diakses 10 November 2011.
- Tarigan, Robinson. 2004. **Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi**. Bumi Aksara: Jakarta.
- Todaro, Michael P. 2003. **Pembangunan ekonomi di Dunia Ketiga**. Penerjemah : Haris Munandar. Erlangga: Jakarta